



Sambutan Menteri Sosial RI

**Dalam Rangka Rapat Koordinasi Nasional
Program Keluarga Harapan (PKH)**

Jakarta, 2 Mei 2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang Saya Hormati:

- Pejabat Esselon I dan II Kementerian Sosial RI beserta jajarannya
- Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota se-Indonesia
- Koordinator Regional, Koordinator Wilayah PKH se-Indonesia
- Bapak Ibu undangan dan peserta yang berbahagia

Mengawali sambutan ini saya mengajak kita semua untuk memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mengikuti **“Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019”**

Hadirin yang saya hormati,

Keberhasilan Indonesia dalam penanganan kemiskinan telah menarik perhatian dunia. Tren angka kemiskinan di Indonesia terus menurun hingga kini menyentuh di bawah level 1 digit sebesar 9,82% per maret 2018 dan 9,66% per September 2018. Capaian ini disertai penurunan angka ketimpangan (gini rasio) yang konsisten sejak tahun 2014 hingga mencapai level 0,384 per September 2018. Di samping itu, Kualitas hidup manusia yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik ke level 71,39 atau meningkat 0,58 poin dibandingkan tahun 2017.

Fakta peningkatan indikator kesejahteraan sosial tersebut di atas tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi secara merata sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang membuka akses warga di pelosok terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Kebijakan menjaga pertumbuhan ekonomi senyampang dengan perubahan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang menekankan penguatan program perlindungan sosial. Banyak kalangan menilai hal inilah yang melindungi masyarakat Indonesia dari dampak perlambatan ekonomi global karena pembangunan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintahan Jokowi sejak awal memang mencanangkan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai agenda prioritas. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa, membangun Indonesia dari pinggiran, dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia adalah beberapa poin penting Nawacita yang

merupakan refleksi visi kesejahteraan sosial yang diusung oleh Presiden Jokowi.

Komitmen tinggi terhadap pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari semakin meningkatnya anggaran untuk perlindungan sosial. Bahkan di tengah pelambatan ekonomi global serta postur APBN yang ketat, pemerintah Jokowi terus meningkatkan anggaran perlindungan sosial dari 249,7 T di tahun 2015 ke 274,7 T di tahun 2017 dan 387,3 T di tahun 2019. Anggaran perlindungan sosial tersebut difokuskan khususnya bagi 40% masyarakat lapisan terbawah melalui berbagai skema program antara lain PKH, Bantuan Pangan, JKN/PBI, Dana Desa, PIP, Bidik Misi, dan subsidi di luar subsidi pajak. Khusus PKH, anggarannya naik secara drastis dari 19,8 T ke 34,4 T di tahun 2019.

Penguatan program-program perlindungan sosial di masa pemerintahan Jokowi semakin memperkuat model Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Semangat dan kehendak kuat untuk menghidupkan kembali semangat “Negara Kesejahteraan” dapat kita lihat dalam berbagai

program-program dan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di mana negara terlibat secara sungguh-sungguh dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Pemerintahan Jokowi menyadari bahwa konsepsi negara kesejahteraan melandasi seluruh bangunan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesejahteraan menjiwai konstitusi yang dibangun oleh para *Founding Fathers* di mana negara berkewajiban memenuhi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Fenomena bangkitnya kembali negara kesejahteraan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di banyak negara, terutama di Asia. Perubahan besar yang terjadi dalam aspek kebijakan sosial dan perlindungan sosial ini oleh Majalah *The Economist* edisi September 2012 sebagai *Asia's Next Revolution*. Ini ditandai dengan lahirnya kebijakan sosial di banyak negara

Asia untuk mengaktivasi program-program perlindungan sosial antara lain dalam bentuk bantuan langsung (*cash transfer*). Hasil penelitian Armando Barrientos dan David Hulme (2010) menunjukkan bahwa di banyak negara *cash transfer* kepada keluarga atau rumah tangga merupakan komponen kunci yang efektif dalam penanganan kemiskinan.

Di Indonesia, model *cash transfer* diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan perlindungan sosial, di antaranya yang paling menonjol adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang di era pemerintahan Jokowi menjelma menjadi episentrum program-program penanganan kemiskinan. Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) dari aspek perluasan jumlah penerima manfaat menjadi 10 juta keluarga dinilai sebagai faktor yang berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan diharapkan lebih besar lagi dengan kebijakan peningkatan nilai bantuan PKH yang ditujukan untuk memberi dampak yang lebih besar terhadap perubahan ekonomi dan sosial keluarga.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan PKH, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan. *Pertama*, sistem penyaluran bantuan sosial. Pada tahun 2017 diambil terobosan kebijakan penyaluran bantuan sosial termasuk PKH secara terintegrasi melalui satu kartu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS merupakan kebijakan inovatif pertama di antara negara-negara yang melakukan Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash transfer*).

Kedua, Penguatan sistem informasi manajemen dalam E-PKH. Seluruh bisnis proses PKH mulai dari validasi data, penyaluran bantuan, verifikasi komitmen, pemutakhiran data hingga pendampingan kelompok dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) terolah dan tersaji secara integratif dalam satu sistem E-PKH. Di samping itu, PKH mempunyai sistem dan mekanisme dalam memastikan akurasi data melalui validasi data dan pemuktahiran data.

Pada kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa data kemiskinan memiliki peran sentral dalam menentukan efektifitas program

penanganan kemiskinan. Mengingat kemiskinan bersifat dinamis, updating data kemiskinan perlu dilakukan secara periodik guna menghindari atau mereduksi adanya *inclusion error* ataupun *exclusion error* dalam penyaluran bantuan sosial. Untuk itu, dibutuhkan komitmen tinggi seluruh stakeholders baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk melakukan pemutakhiran (updating) terhadap Basis Data Terpadu Kemiskinan sebagai data induk seluruh program penanganan kemiskinan sesuai amanat UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dalam rangka menjamin kualitas data, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan kementerian/ lembaga lain seperti dengan Kemdagri terkait dengan data kependudukan, dengan TNP2K dan BPS terkait dengan perangkaan rumah tangga, dengan Kementerian ATR/BPN terkait dengan kepemilikan aset, dan dengan Kemendes terkait dengan dukungan alokasi anggaran dana desa untuk proses verifikasi dan validasi. Kami sangat berharap Pemerintah Daerah turut proaktif dalam proses pemutakhiran

data, termasuk memastikan mekanisme Musdes atau Muskel berjalan sebagaimana mestinya. Mekanisme Musdes dan Muskel merupakan upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data kemiskinan secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kami percaya bahwa pembangunan kesejahteraan sosial akan optimal manakala partisipasi publik dibuka secara luas.

Ketiga, Kementerian Sosial juga melakukan peningkatan kapasitas kepesertaan PKH dengan menyempurnakan kualitas modul dan pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Kritik para akademisi terhadap program penanganan kemiskinan di masa lalu adalah minimnya dampak program penanganan kemiskinan terhadap penurunan angka kemiskinan akibat lemahnya daya dorong program terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat miskin. P2K2 menegaskan bahwa perubahan sikap dan perilaku merupakan komponen penting dalam PKH. Melalui P2K2, peningkatan taraf kemandirian dan kesejahteraan di kalangan KPM didorong sehingga diharapkan mereka melakukan keluar dari kepesertaan (graduasi) secara mandiri.

Selain itu, dilakukan perbaikan terhadap kebijakan verifikasi komitmen KPM PKH untuk seluruh anggota keluarga. Penyesuaian kewajiban KPM PKH dengan protokol kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan monitoring pelaksanaan P2K2 secara terus menerus. Melalui P2K2, KPM mendapatkan pendidikan informal dengan metode pembelajaran Pendidikan Orang Dewasa (POD) yang mudah dipahami dan diimplementasikan.

Keempat, penguatan sumber daya manusia pelaksana PKH. PKH memiliki sistem informasi manajemen SDM PKH yang memungkinkan pengelolaan SDM secara integratif mulai dari proses rekrutmen, seleksi, peningkatan kapasitas, penilaian kinerja, dan sistem *reward and punishment*. Kode Etik SDM PKH juga telah diberlakukan sejak tahun 2018 sebagai pedoman aturan sikap, perilaku dan tindakan SDM dalam menjalankan tugas dan membangun hubungan dengan KPM, sesama rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan mitra kerja PKH.

Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi perubahan dan transformasi masyarakat miskin sebagai unsur terpenting dalam setiap upaya penanganan kemiskinan berjangka panjang. Program perlindungan sosial termasuk PKH semestinya diarahkan tidak semata untuk melindungi warga dari gejolak pertumbuhan tetapi juga sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam rangka mencapai kesejahteraan. Bantuan sosial harus menciptakan hubungan positif antara “keamanan mata pencaharian” dan “peningkatan otonomi atau pemberdayaan’ bagi warga miskin secara keseluruhan. Tujuan inilah yang ingin kita capai melalui PKH. Meski nilai bantuan belum memadai untuk menutupi kebutuhan dasar sepenuhnya, bantuan sosial PKH diharapkan membuka jalan bagi warga miskin untuk berinvestasi dan mengakumulasi lorong-lorong strategis untuk keluar dari kemiskinan dengan meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Hadirin yang saya hormati,

Belajar dari pada negara-negara Skandinavian, konsepsi negara kesejahteraan yang menjadi fundamen pembangunan telah mengantarkan negara-negara seperti Denmark dan Swedia ke dalam urutan negara-negara paling kompetitif di dunia. Hal ini ditandai capaian tertinggi kedua negara tersebut dalam indeks kebahagiaan. Denmark dan Swedia mengalokasikan jumlah anggaran yang sangat besar (sekitar 28% dari PDB) untuk membiayai program-program perlindungan sosial. Dengan anggaran sebesar itu, mereka mampu membiayai banyak program seperti jaminan kesehatan, pensiun, dan tunjangan pengangguran kepada semua warga negara secara cuma-cuma tanpa membedakan status sosial-ekonomi.

Wujud ideal negara kesejahteraan seperti Denmark dan Swedia mungkin masih sulit diimplementasikan di Indonesia. Problem paling mendasar adalah kapasitas finansial Indonesia yang masih sangat terbatas. Yang harus kita lakukan saat ini adalah membangun fondasi yang

kuat bagi terwujudnya negara kesejahteraan. Pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, kebijakan perlindungan sosial, dan reorientasi kebijakan pada pembangunan kualitas manusia di masa pemerintah Jokowi sejatinya merupakan upaya serius dalam membangun fondasi tersebut. Dan, sebagai penutup saya pada kesempatan ini menegaskan bahwa PKH merupakan bagian terpenting dari fondasi negara kesejahteraan yang sedang kita bangun.

Hadirin yang sekalian,

Saya menyambut baik kegiatan Rapat Koordinasi Nasional PKH tahun 2019. Kegiatan ini dapat menjadi pondasi penting bagi seluruh pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam menjalankan tugas-tugas pelaksanaan PKH di daerah. Kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan PKH menjadi faktor pengungkit dalam percepatan penurunan kemiskinan di Indonesia.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan hari ini.

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan tahun 2019 secara resmi saya nyatakan DIBUKA.

Sekian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 2 Mei 2019

Menteri Sosial Republik Indonesia

ttd

Agus Gumiwang Kartasasmita